



The Effect Of The Implementation of A Performance-Based Budget on the Accountability Performance of Government Institutions

Ajeng Dwi Ulandari^{1*}

Tituk Diah Widajantie²

^{1,2}Accounting Department, Faculty of Economics and Business, UPN "Veteran" Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

ISSN: 2723-1097

Keywords:

Budget Implementation,
Budget Planning,
Budget Reporting,
Accountability of
Government
Agencies
Performance

ABSTRACT

This study aims to examine (1) the effect of budget planning on the performance accountability of OPD Sidoarjo regency government agencies (2) the effect of budget execution on the performance accountability of the Sidoarjo regency OPD government agencies (3) the effect of budget reporting / accountability on the performance accountability of the Sidoarjo regency OPD government agencies.

The endogenous variable used is the performance accountability of government agencies. This study used a sample of Sidoarjo Regency Regional Apparatus Organizations, namely 20 Sidoarjo Regency Government Offices. The data collection method is purposive sampling method, by distributing questionnaires. The data analysis technique used Partial Least Square (PLS) with SmartPLS 3.0 software. The results of this study indicate that budget planning and budget reporting / accountability affect the performance accountability of the OPD in Sidoarjo regency government agencies. Meanwhile, budget implementation has no effect on the performance accountability of OPD in Sidoarjo regency government agencies.

Pendahuluan

Organisasi sektor publik memiliki hubungan yang berkaitan dengan pemerintah daerah, seperti orientasi pelayanan dan kepentingan publik, hubungan ini akan lebih transparan dan lebih berkualitas di masa mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya mewujudkan keseimbangan untuk memiliki kemampuan mewujudkan pemerintahan yang berintegritas maupun bertanggungjawab. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan dan membelanjakan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Illayuniga & Rahayu, 2019).

Penerapan anggaran berbasis kinerja adalah adanya perubahan anggaran untuk perbaikan beberapa tahapan dalam penganggaran. Sebelum diterapkan penganggaran berbasis kinerja, hal yang berkaitan dengan anggaran telah diatur

dalam Permendagri No. 13 tahun 2006, dan dirubah menjadi Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah akan mewujudkan pemerintahan yang amanah, dan didukung oleh lembaga pemerintah yang efektif, profesional, dan bertanggung jawab yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik secara lebih transparansi dan meningkatkan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBD (Basri, 2016).

Dalam organisasi swasta atau privat, anggaran merupakan hal yang sangat rahasia, sedangkan dalam organisasi sektor publik, anggaran adalah suatu hal yang harus diumumkan kepada masyarakat, dan harus dilakukan perbaikan, dikritisi, dan diberikan solusi untuk memaksimalkan kinerja instansi pemerintah. Adanya pengaruh anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, anggaran menjadi sangat relevan dan penting dalam lingkungan pemerintahan, yang terkait fungsi dari pemerintahan dengan memberikan layanan pada publik (Wibisono, 2016).

Pelaksanaan anggaran adalah tahapan dimana seluruh unit kerja di instansi pemerintah melaksanakan anggaran dalam siklus APBN yang merupakan bagian penting dari pelaksanaan anggaran, karena apabila proses pelaksanaan anggaran tidak berjalan secara normal maka akan berdampak pada siklus APBN tersebut (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) (Deputi IV BPKP, 2005).

Bentuk pertanggungjawaban/pelaporan anggaran pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan informasi yang terkait tentang laporan keuangan suatu periode pelaporan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah bentuk untuk melaporkan atas berhasil tidaknya instansi pemerintah dalam melaksanakan tujuan dan sasaran organisasi (Utami et al., 2017).

Kajian Teori

Teori Agency (*Agency Theory*)

Dalam teori agency menjelaskan hubungan keagenan, yaitu kontrak pengalihan dari pemilik (*principal*) ke pekerja (*agent*), melalui pendelegasian sebagian dari kekuasaan pengambilan keputusan, untuk melakukan tugas-tugas tertentu kepada *agent* sesuai untuk kepentingan *principal* (Illayuniga & Rahayu, 2019). Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan sebuah pertanggungjawaban, dalam hal ini pemerintah sebagai agent harus bertanggung jawab atas kegiatannya kepada masyarakat sebagai pemberi dana (*public fund*). Pihak agent yang melakukan tugas yang diberikan dalam pengelolaan anggaran harus bertanggung jawab atas semua program/kegiatan kepada pihak principal yang memberi perintah. Pengelola anggaran/pengawas

keuangan (agent) yang melakukan pengelolaan anggaran melaporkan anggaran pada tahun berjalan diharapkan sama dengan kinerja yang dilaksanakan agar bawahan tidak dapat memanfaatkan kesempatan dalam pengelolaan anggaran di dalam OPD (Sya'roni, 2019).

Teori Kontijensi (Contingency Theory)

Dalam bidang teori organisasi, metode kontingensi juga dapat membantu perkembangan akuntansi manajemen dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individual dan organisasi (Idrus et al., 2015). Menurut (Wibisono, 2016) efektivitas organisasi merupakan fungsi dari struktur organisasi dan kesesuaian lingkungan organisasi itu dilakukan. Diasumsikan bahwa penerapan diantara sistem akuntansi manajemen dan variabel kontingensi organisasi dapat memberikan kesimpulan untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan individu yang ada didalamnya.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan tahap awal pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam perencanaan anggaran, perkiraan pengeluaran dibuat berdasarkan perkiraan pendapatan yang tersedia, tetapi sebelum menyetujui perkiraan pengeluaran, pendapatan harus diestimasi dengan lebih akurat. (Illayuniga & Rahayu, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Utami et al., 2017) menghasilkan bahwa pengaruh perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi.

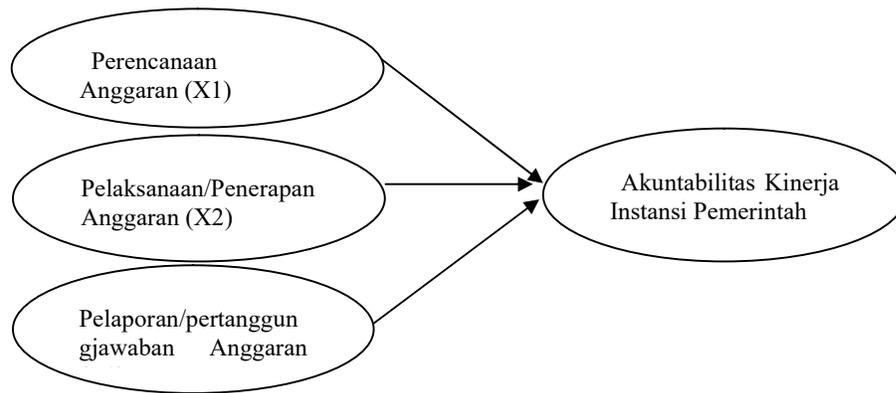
Penerapan/pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran adalah pembuatan data mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dijadikan sebagai acuan bagi pengguna anggaran untuk melaksanakan anggaran. Pelaksanaan anggaran mengacu pada tahap di mana semua unit kerja dalam organisasi melaksanakan anggaran. Untuk melakukan pengawasan, masing-masing atasan membuat laporan realisasi anggaran, kemudian setelah menyelesaikan semua pekerjaan, menganalisis laporan realisasi anggaran dan menyampaikan hasilnya kepada atasan (Utami et al., 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Roni 2019) dengan menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan/penerapan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya.

Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran

Instansi pemerintah harus melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja dan memberikan laporan pada pemerintah pusat, instansi pemerintah kabupaten / kota. Penanggung jawab laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah pimpinan lembaga, dan harus bertanggung jawab bersama tim

kerja serta menjelaskan berhasil tidaknya tingkat kinerja yang dicapai. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan tahapan awal dalam proses pertanggungjawaban (Wibisono, 2016). Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Illayuniga & Rahayu, 2019) yang menjelaskan bahwa pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Data diolah (2021)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data untuk penelitian menggunakan data primer berbentuk kuesioner penelitian, pendekatan analisis yang digunakan yaitu Partial Least Square (PLS) dengan bantuan menggunakan software SmartPLS 3.0.

Populasi yang digunakan adalah Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan keuangan, perencanaan dan pelaporan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kriteria untuk pengambilan sampel dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kabupaten Sidoarjo
- 2) Jabatan Kepala Sub bagian Keuangan/Anggaran
- 3) Jabatan bendahara (pengeluaran)
- 4) Jabatan Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Dari total kuisisioner yang dibagikan terdapat 60 kuisisioner. Jumlah kuisisioner yang dikembalikan adalah 54, dan 6 kuisisioner yang tidak dikembalikan.

Perencanaan Anggaran menggunakan skala likert yang menggunakan skala pengukuran atau interval. Variabel ini diukur dengan instrument dari penelitian ini yang diambil dari penelitian terdahulu (Utami et al., 2017). Pelaksanaan/penerapan Anggaran menggunakan skala likert yang menggunakan skala pengukuran atau interval. Sumber instrument ini diambil dari penelitian terdahulu (FERNIYANTI et al., 2019).

Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran menggunakan skala likert yang menggunakan skala pengukuran atau interval. Sumber instrument diambil dari penelitian terdahulu (Utami et al., 2017).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, dengan menyebarkan kuisioner yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo. Metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian survei, dengan menyebarkan kuisioner kepada responden.

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Outer Model

Uji Validitas Convergent

Validitas Convergent dari model pengukuran dilihat dari setiap nilai loading factor yaitu nilai indikator yang dihasilkan untuk mengukur setiap variabelnya dengan Software SmartPLS. Pada tahap awal terdapat beberapa hasil yang berwarna merah menunjukkan hasil di bawah 0,70 tidak memenuhi kriteria batas minimal. Sehingga harus dilakukan eliminasi indikator yang nilai loading factor di bawah 0,70. Pada tahap kedua telah dilakukan eliminasi indicator yang memiliki nilai loading factor dibawah 0,70 yaitu AKIP 7.

Tabel 2 Validitas Convergent

Indikator	PRA (X1)	PENA (X2)	PA (X3)	AKIP (Y)
PRA 1	0.837			
PRA 2	0.834			
PRA 3	0.891			
PRA 4	0.833			
PRA 5	0.819			
PRA 6	0.797			
PRA 7	0.829			
PRA 8	0.799			
PRA 9	0.776			

Indikator	PRA (X1)	PENA (X2)	PA (X3)	AKIP (Y)
PRA 10	0.785			
PENA 1		0.854		
PENA 2		0.860		
PENA 3		0.853		
PA 1			0.863	
PA 2			0.892	
PA 3			0.877	
AKIP 1				0.755
AKIP 2				0.741
AKIP 3				0.739
AKIP 4				0.789
AKIP 5				0.758
AKIP 6				0.817
AKIP 8				0.838
AKIP 9				0.782
AKIP 10				0.851

Sumber: Data diolah (2021)

Uji Validitas Discriminant

Hasil dari penelitian ini pada Tabel 3 menunjukkan bahwa semua indikator yang membentuk variabel perencanaan anggaran, penerapan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran memiliki nilai loading factor dari setiap variabel lebih tinggi dari variabel lainnya.

Tabel 3 *Cross loading factor*

Indikator	PRA (X1)	PENA (X2)	PA (X3)	AKIP (Y)
PRA 1	0.872	0.643	0.663	0.625
PRA 2	0.843	0.765	0.794	0.619
PRA 3	0.909	0.684	0.663	0.625
PRA 4	0.872	0.737	0.679	0.623
PRA 5	0.838	0.715	0.706	0.691
PRA 6	0.772	0.549	0.558	0.694
PRA 7	0.816	0.566	0.541	0.746
PRA 8	0.797	0.653	0.680	0.612
PENA 1	0.677	0.909	0.766	0.701
PENA 2	0.725	0.859	0.736	0.570
PA 1	0.659	0.713	0.860	0.715
PA 2	0.781	0.884	0.893	0.685
PA 3	0.653	0.650	0.879	0.772
AKIP 1	0.519	0.629	0.662	0.734
AKIP 4	0.743	0.726	0.783	0.824
AKIP 5	0.720	0.521	0.635	0.763

AKIP 6	0.609	0.590	0.722	0.853
AKIP 8	0.650	0.532	0.554	0.842
AKIP 9	0.536	0.464	0.547	0.763
AKIP 10	0.626	0.593	0.723	0.860

Sumber: Data diolah (2021)

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dapat diukur dengan composite reliability lebih dari 0,70 dan cronbach's alpha lebih dari 0,60. Sehingga semua konstruk dapat dikatakan memenuhi kriteria reliabel jika nilai composite reliability lebih dari 0,70 dan cronbach's alpha lebih dari 0,60.

Tabel 4. Uji Reabilitas

	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
PRA (X1)	0.951	0.940
PENA (X2)	0.878	0.724
PA (X3)	0.909	0.851
AKIP (Y)	0.929	0.910

Sumber: Data diolah (2021)

Uji R-square

Pada Tabel 5 pengujian R-square menunjukkan bahwa konstruk Perencanaan Anggaran (X1), Penerapan Anggaran (X2), Pertanggungjawaban Anggaran (X3) dan interaksinya sebesar 73,2% dan 26,8% sisanya dijelaskan oleh variabel selain variabel dalam penelitian ini.

Tabel 5. R-square

Konstruk	(R-Square)
Y (AKIP)	0.732

Sumber: Data diolah (2021)

Uji t-statistic

Pada Tabel 6 menjelaskan bahwa variabel Perencanaan Anggaran dan Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki t-statistik > nilai t-tabel yaitu diatas 1.96, kemudian variabel Penerapan Anggaran memiliki nilai t-statistik < nilai t-tabel diatas 1.96. Kemudian pada variabel Perencanaan Anggaran dan Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah memiliki P-value dibawah 0.05, sedangkan pada variabel Penerapan Anggaran memiliki nilai P-value diatas 0.05.

Tabel 6. uji t-statistic

Hipotesis		T-Statistics (ρ /STDEV)	P-Values
H1	Perencanaan Anggaran -> AKIP	2.192	0.029
H2	Penerapan Anggaran -> AKIP	0.403	0.687
H3	Pertanggungjawaban Anggaran -> AKIP	3.243	0.001

Sumber: Data diolah (2021)

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis 1 diterima dan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD Kabupaten Sidoarjo. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Utami et al., 2017). (Mardiasmo, 2017) menyatakan bahwa anggaran merupakan perkiraan kinerja yang diharapkan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu sebagai ukuran keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran, maka semakin baik juga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dapat diartikan bahwa sebuah instansi pemerintah dapat mengoptimalkan perencanaannya untuk meningkatkan akuntabilitasnya sebagai salah satu upaya pembangunan, perkembangan masyarakat sesuai dengan kepentingan dan pelayanan kepada publik.

Pengaruh Penerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 ditolak dan penerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD Kabupaten Sidoarjo. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Illayuniga & Rahayu, 2019). Menurut (Mardiasmo, 2017) bahwa penerapan anggaran adalah tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada dalam instansi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran tidak dapat dijadikan sebagai indikator pengukur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada dasarnya penerapan anggaran yang baik dalam suatu instansi harus memiliki hasil akhir (output) yang baik. Oleh karena itu, penerapan anggaran tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan adanya indikasi bahwa penerapan anggaran tidak berjalan maksimal dari program/kegiatan yang telah

direncanakan dan adanya pegawai OPD Kabupaten Sidoarjo masih belum siap dengan adanya perubahan struktur dalam OPD yang membutuhkan penyesuaian.

Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis 3 diterima dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD Kabupaten Sidoarjo. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Roni, 2019). Wibisono, (2016) Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan tahapan awal dalam proses pertanggungjawaban anggaran yang relevan, dapat diandalkan dan mudah dipahami oleh pengguna informasi. Semakin baik pelaporan / pertanggungjawaban anggaran maka semakin baik pula pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara transparan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaporan / pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja OPD instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Semakin baik perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, semakin baik pula kinerja instansi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan pelayanan publik.

Akan tetapi penerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan penerapan anggaran tidak berjalan maksimal dari program/kegiatan yang telah direncanakan dan adanya pegawai OPD Kabupaten Sidoarjo masih belum siap dengan adanya perubahan struktur dalam OPD yang membutuhkan penyesuaian.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (1) bagi OPD Kabupaten Sidoarjo, diharapkan dalam penerapan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan perencanaan anggaran yang ada dan memperbaiki sistem akuntansi keuangan dalam proses pencatatan keuangan, (2) bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mempelajari masalah yang sama, disarankan untuk mengembangkan variabel penelitian dan memperluas penggunaan objek penelitian. Tidak hanya mengumpulkan data pokok dari kuisioner yang disebar, tetapi juga harus dilakukan wawancara atau observasi.

Daftar Pustaka

Abdillah, w. D. J. H. (2014). *Partial Least Square (PLS)*. Andi.

- Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah. 2011. *Laporan Akuntabilitas Pusdiklatwas*. BPKP, Bogor.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sidoarjo (BPKAD). 2019. *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo*.
- Basri, safaruddin (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah. *Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik (Ketiga)*. Erlangga.
- Damanik, R. H. (2018). *Pengaruh Kebijakan Penyusunan Anggaran , Penerapan Anggaran Dan Belanja Daerah Berbasiskinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. 1(1), 89-110.
- Deputi IV BPKP. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)* Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidoarjo. 2019. *Daftar SKPD Kabupaten Sidoarjo*
- Evaranus, Kristiani. (2020). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran, dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Instansi Pemerintah*. 9(3), 2460-0585.
- Ferniyanti, N., Supriyadi, E., Pertanian, K., & Pascasarjana Universitas Pancasila, S. (2019). *Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pelaksanaan Anggrana Berbasis Kinerja Dan Evaluasi Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Karantina Pertanian Jakarta)*. 4(1).
- Fitriyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 19.
- Fратиwi, U. G., Utary, A. R., & Irwansyah, R. (2018). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 3(4), 1-11.
- Friska, Y. (2015). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi). 1(1), 2460-6235.
- Gendro, W. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. Yogyakarta: Percetakan STIM YKPM
- Ghozali, Imam, Latan, Hengky. (2015). *Partial Least Square Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Edisi Kedua*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Dua. Jakarta: Salemba Empat
- Idrus, R., Taufik, T., & Claura, A. (2015). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33951.

- Illayuniga, R., & Rahayu, Y. (2019). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Volume 8*, (September).
- Indah Safitri, A. S. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah). *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 2(2), 1-13.
- Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (2003). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mangkunegara, Anwar. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Prastianingrum, K. et al. (2016). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Alor. Jurnal Akuntansi ...*, 56-68.
- Purwanto, A. dan. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Erlangga
- Sholihin, Mahfud & Ratmono, Dwi. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Non Linear Dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Simanjuntak, Binsar H. (2010). *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia*. disampaikan pada kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia Jakarta 9 Desember 2010.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta.
- Suharnoko, Dwi. (2019). *Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Malang*. *Karta rahardja*. 1(2).
- Sya'roni, M. (2019). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 8(8), 2460-0585
- Ulum, I. (2010). *Akuntansi Sektor publik*. UMM Press.
- Utami, W., Afrizal, H., & Machpudin, A. (2017). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 56-68.
- Wibisono, S. (2016). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Akuntansi dan Keuangan*, 56-58.